**Peran Internal Auditor dalam Melaksanakan *Good Corporate Governance*
(Studi Kasus pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi)**

Isma Setiarahmah
NIM. 135020307111009
setiarahmahisma@gmail.com

Akie Rusaktiva Rustam, MSA., Ak.
Dosen Pembimbing

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya

Abstrak:

Rumah sakit islam jakarta pondok kopi merupakan salah satu rumah sakit swasta yang terletak di jakarta timur, merupakan salah satu rumah sakit yang banyak dituju masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas good corporate governance dan pelaksanaan internal audit dalam melaksanakan good corporate governance pada rumah sakit islam jakarta pondok kopi. Metode analisis yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini dilakukan dengan kualitatif deskripsi dengan mengumpulkan data melakukan wawancara, telaah dokumen, dan tinjauan pustaka. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, rumah sakit islam telah memiliki satuan pengendalian internal yang memadai untuk menunjang pelaksanaan aktivitas internal audit, namun masih ditemukan karyawan yang belum memenuhi standar perusahaan selain itu monitoring internal audit belum dilakukan secara mendalam. Selanjutnya rumah sakit telah melaksanakan prinsip good corporate governance dengan baik, namun pada beberapa prinsip, rumah sakit masih belum melaksanakan good corporate governance dengan efektif hal ini dapat dilihat dalam prinsip tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan dan kewajaran yang masih terdapat kelemahan berupa lemahnya pengawasan, masih terdapat karyawan yang memiliki hubungan keluarga, dan pengumuman rekrutmen karyawan baru yang kurang efisien. Untuk peran internal audit dalam melaksanakan good corporate governance, ini telah dilakukan dengan baik dan efektif pada semua prinsip good corporate governance. Saran yang diberikan peneliti dalam pelaksanaan good corporate governance yaitu melakukan tindak lanjut atas adanya karyawan yang memiliki hubungan keluarga di satu unit yang sama, membuat *whistleblowing system*, dan mengumumkan pengumuman rekrutmen karyawan pada website rumah sakit. Untuk pelaksanaan internal audit, perlu dilakukan pengawasan mendalam untuk memastikan laporan yang diberikan telah benar dilaksanakan.

Abstract:

This research's background was due to the urgency of good corporate governance in Indonesia and also the importance of internal audit role to become the supervisor of company's internal activity in order to implement the good corporate governance. It aims to know the good corporate governance activity and the implementation of internal audit in implementing good corporate governance in Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. The analysis method used in this research was qualitative descriptive by collecting data from interview, document research, and references overview. From the result of this research, it can be concluded that RumahSakit Islam Jakarta Pondok Kopi have already had appropriate internal control unit to support the implementation of internal audit activity, however there were employee who have not met the company standards. Besides, internal audit monitoring has not been deeply applied. The next, RumahSakit Islam Jakarta Pondok Kopi have

conducted good corporate governance principle, yet to some principles have not conducted effectively by RumahSakit Islam Jakarta Pondok Kopi which can be seen from the independency, equality and proper principles since there were weaknesses such as external audit who came from organization institution and the existence of employee who have family relationship. For internal audit role in implementing good corporate governance, it has been well and effectively conducted to all good corporate governance principles.

PENDAHULUAN:

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan bisnis tentu sangat berkembang secara pesat. Perusahaan-perusahaan dituntut untuk dapat bersaing agar tetap hidup dan dapat terus mempertahankan aktivitas bisnisnya. Dalam pelaksanaan aktivitas bisnisnya, perusahaan tentu memiliki banyak keterkaitan pihak didalamnya agar aktivitas bisnis tetap berjalan, agar pihak-pihak tersebut memiliki hubungan yang baik, bekerja dengan peraturan yang ada, dan tidak melakukan tindakan yang menyimpang maka diperlukan sebuah tata kelola perusahaan yang baik bagi sebuah perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan isu sentral dalam pengelolaan perusahaan pada saat sekarang ini. Dengan terjadinya berbagai peristiwa yang menimpa banyak perusahaan besar, yang selanjutnya beberapa diantaranya dinyatakan bangkrut, di Amerika Serikat, telah menyadarkan banyak pihak di seluruh dunia tentang pentingnya pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar (Utama 2004:7). Masalah terkait *Good Corporate Governance* menjadi salah satu sorotan terutama di Indonesia terutama karena Indonesia berada di peringkat yang rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Survey yang telah dilakukan oleh OECD (*Organisation for EconomicCo-operation and Development*) atas nilai *corporate governance* pada tahun 2013

untuk beberapa Negara di asean, dan survey tersebut menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Negara asean lainnya seperti, Filipina, Singapore, Malaysia, dan Thailand. Hal-hal tersebut menunjukkan penerapan GCG di Indonesia belum dilaksanakan dengan baik, dilihat dari pelaksanaan beberapa poin prinsip GCG yang berada dalam tingkat rendah.

Menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) Good Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang diterapkan perusahaan guna mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. Agar perusahaan dapat terkendali dengan baik perlu adanya penerapan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) diantaranya yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Untuk mendukung terlaksananya *good corporate governance* pada perusahaan maka diperlukan peran yang tinggi bagi internal auditor. Internal auditor memiliki peran sebagai pengawas atas semua aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, sehingga secara tidak langsung peran internal auditor diperlukan agar pelaksanaan *good corporate governance* perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Menurut KNKG (2006) peran internal audit berguna untuk memaksimalkan fungsi dan peran dari Dewan Direksi yang dimana Dewan Direksi memiliki tugas dan bertanggungjawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas good

corporate governance dan peran internal audit dalam melaksanakan good corporate governance pada rumah sakit islam jakarta pondok kopi.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Audit Internal

Menurut Agoes (2012:204) Audit Internal (pemeriksaan internal) adalah proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan.

Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Tugiman (2003) tujuan internal audit adalah untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang efektif. Agar tujuan ini dapat tercapai, staf audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan melakukan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan yang dianalisis.

Sawyer (2005) menjelaskan bahwa ruang lingkup internal audit terdiri dari tiga kategori, yaitu keuangan, ketaatan, dan operasional. Dalam kategori keuangan, internal audit memiliki peran untuk menganalisis aktivitas ekonomi perusahaan yang kemudian diukur dan dilaporkan melalui metode akuntansi.

Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal

Fungsi audit menurut Mulyadi (2002:211) adalah untuk menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisien pelaksanaan fungsi sebagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi internal audit merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

Selanjutnya, dibawah ini merupakan tanggung jawab internal audit menurut Morariu *et al* (2009):

1. Mereview sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal.
2. Mempertimbangkan informasi keuangan dan operasi; metode review yang digunakan dapat dengan mengidentifikasi, menghitung, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi pemeriksaan spesifik beberapa aspek aktivitas yang dipisahkan termasuk detail verifikasi transaksi, account balances, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur hal tersebut
3. Mereview fungsi ekonomi secara fungsional, efisiensi serta efektivitas semua aktivitas dan operasi.
4. Mereview kesesuaian aturan yang dikeluarkan perusahaan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Melakukan investigasi special untuk tujuan tertentu, seperti kecurigaan adanya penipuan dan hal lain mengenai *losses prevention*.

Independensi Auditor Internal

Sawyer (2006:35) mengemukakan bahwa auditor internal yang professional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalismenya; memberika opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya; bukan melaporkan susai dengan keinginan eksekutif atau lembaga.

Pelaksanaan Internal Audit

Menurut Tugiman (2003:57-58) menjelaskan bahwa terdapat empat langkah kerja pelaksanaan audit internal, diantaranya yaitu:

1. Perencanaan audit. Auditor internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit dengan benar dan akurat. Perencanaan ini harus dicatat dan didokumentasikan dan harus meliputi; penetapan tujuan audit, mendapatkan informasi tentang latar belakang, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit, mengkomunikasikan hasil penugasan audit dengan semua pihak yang berkaitan, mengidentiikasi

- bidang-bidang yang menjadi perhatian audit, menulis program audit, mengidentifikasi prosedur untuk mengkomunikasikan hasil audit, dan mendapatkan persetujuan atas rencana kerja audit.
2. Pengujian dan pengevaluasian informasi. Auditor internal harus mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang akurat dan kompeten serta memadai untuk menunjang temuan audit agar bermanfaat bagi organisasi dalam mencapai sasarannya. Auditor juga harus mendokumentasikan temuan-temuannya dengan menggunakan kertas kerja audit, mencatat informasi yang diperoleh dan membuat setiap analisis dari informasi yang diperoleh tersebut.
 3. Penyampaian hasil audit. Pekerjaan auditor hanya akan memberikan manfaat yang sedikit untuk entitas apabila hasil penugasan audit tidak dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang berkaitan. Setelah audit diselesaikan, auditor internal harus menyerahkan laporan tertulis yang ditandatangani. Standar praktik profesional audit internal mendorong auditor internal untuk membahas kesimpulan audit dan juga rekomendasinya dengan tingkat manajemen yang sesuai sebelum menerbitkan laporan akhir hasil audit. Laporan audit internal harus dilaporkan secara objektif dan ditulis sejelas mungkin. Laporan audit internal tidak hanya menguraikan ruang lingkup audit dan tujuannya, namun juga harus disertai dengan hasil audit. Laporan ini harus disampaikan secara tepat waktu dan bersifat konstruktif serta disampaikan juga dengan rekomendasi untuk peningkatan ataupun rekomendasi atas hasil yang ditemukan. Laporan audit internal juga harus memuat kinerja yang memuaskan.
 4. Tindak lanjut hasil audit. Auditor internal harus melakukan tindak lanjut masalah yang dikemukakan ataupun yang direkomendasikan dalam laporan hasil audit. Auditor internal juga harus menentukan apakah setiap tindakan perbaikan yang diperlukan, yang dinyatakan dalam laporan audit telah dilakukan atau manajemen menyadari adanya risiko yang terkait dengan tidak melakukan perbaikan atas hal tersebut.

Corporate Governance

Definisi Corporate Governance menurut Cadbury Committee yang memandang *corporate governance* sebagai:

Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka. (I Nyoman *et al*, 2003;27)

Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang disusun oleh KNKG (2006) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

- a. *Transparansi (Transparency)*. Prinsip ini untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditor dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. *Akuntabilitas (Accountability)*. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara

benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

- c. **Responsibilitas** (*Responsibility*). Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
- d. **Independensi** (*Independency*). Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. **Kewajaran dan Kesetaraan** (*Fairness*). Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Mengutip dari Nawawi dan Martini dalam Kasiram (2010) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan

untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya.

Jenis Data

1. **Data Primer.** Menurut Indrianto dan Supomo (1999) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer melalui hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden.
2. **Data Sekunder.** Peneliti juga melakukan pengumpulan data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:13) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder diperoleh melalui orang lain atau dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi penelitian yang dilakukan. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen seperti peraturan-peraturan yang ada pada rumah sakit, job desc pada masing-masing divisi yang dituju oleh peneliti, dan juga data pendukung lainnya yang terdapat dalam internet.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara,

observasi, dokumentasi, dan penelitian pustaka. Berikut merupakan pengertian dari setiap teknik pengumpulan data yang dilakukan.

1. **Wawancara.** Wawancara dilakukan dengan divisi yang berkaitan dengan topik yang diambil peneliti, yaitu wawancara dengan bagian internal auditing dan bagian-bagian yang terkait dengan pengimplementasian gcg pada perusahaan.
2. **Observasi.** Metode observasi ini dilakukan peneliti dalam melihat kejadian-kejadian yang terjadi selama proses penelitian, seperti kegiatan internal audit yang dilakukan dalam perusahaan dalam menerapkan gcg, yang nantinya akan dijadikan dasar melakukan evaluasi.
3. **Dokumentasi.** Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang diperlukan, metode ini dapat dilakukan dengan mencatat dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan, mengumpulkan data-data mengenai hal-hal berupa catatan, berkas, dan formulir- formulir yang setidaknya diperlukan dalam penelitian ini, dan juga merekam proses wawancara.
4. **Studi Pustaka.** Peneliti melakukan studi pustaka dengan membandingkan hasil wawancara dan hasil penelitian lainnya dengan membandingkannya dengan teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dikutip oleh Salim (2006: 20-24), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*), peneliti menggunakan tiga analisis data yang telah disebutkan tersebut. Dibawah ini pengertian mengenai tiga analisis teknik data tersebut, diantaranya yaitu:

1. **Reduksi Data.** Reduksi data adalah proses penelitian dengan melakukan penelitian dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. **Penyajian Data.** Setelah melakukan reduksi data, peneliti melakukan penyajian data. Dalam proses penyajian data yang telah direduksi, datadiarahkan agar terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat berupa uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, table, dan lain-lain.
3. **Tahap terakhir** adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan, konfigurasi yang mungkin ada, dan proposisi. (Siregar, 2012)

Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi (Siregar, 2012:148). Uji keabsahan data dengan pada penelitian ini melakukan Triangulasi Data. Menurut Moleong (2007:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap hasil penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang berupa informasi dari objek penelitian, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini. Selanjutnya, triangulasi metode (teknik) merupakan

triangulasi yang berupa teknik pengumpulan data, triangulasi metode ini didapatkan dengan cara yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelitian pustaka.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance pada rumah sakit islam jakarta pondok kopi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disusun dalam KNKG (2006) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan dan keawajaran.

- a. **Transparansi.** Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya dan Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. peneliti tidak dapat mengakses laporan keuangan, maka peneliti menilai bahwa transparansi atas laporan keuangan belum sepenuhnya dijalankan dengan rumah sakit. Karena peneliti tidak bisa memastikan dan menilai apakah betul rumah sakit telah menyajikan laporan keuangan tersebut dan telah dipublikasikan secara tepat waktu atau tidak. rumah sakit telah ditulis secara jelas dan *publish* di website rumah sakit. Prinsip ini telah dijalankan dengan baik oleh rumah sakit, yang dimana PKB telah dikomunikasikan kepada karyawan melalui sosialisasi PKB yang dilakukan dua tahun sekali dan telah menerapkan kebijakan mutu dengan baik kepada pasien.
- b. **Akuntabilitas.** Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ

perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan dan perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Rumah sakit telah memiliki susunan organisasi yang jelas pada setiap susunan organisasi, dan juga telah menetapkan rincian tugas pada setiap unit yang ada pada susunan organisasi sesuai dengan ruang lingkup dan kemampuan masing-masing susunan organisasi. peneliti menilai bahwa pengukuran kinerja karyawan telah memiliki elemen penilaian kinerja yang memadai, untuk sistem pengukuran reward and punishment peneliti menilai bahwa rumah sakit telah memiliki penilaian yang efektif dan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah disusun sehingga sistem ini dapat memberikan motivasi bagi karyawan agar terus mengembangkan dirinya dan menjauhi larangan-larangan agar tidak mendapatkan sanksi.

- c. **Responsibilitas.** Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*) dan perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. peneliti menilai bahwa pemantauan akan lebih baik jika dilakukan dengan seluruh jajaran organisasi yang ada pada rumah sakit islam, hal ini dapat dilakukan dengan menyusun *whistleblowing system* agar seluruh anggota organisasi dapat

melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan dengan staff pembinaan puskesmas dan kesehatan, yang menjelaskan bahwa telah dilaksanakan pembinaan kesehatan pada daerah cakung penggilingan di bulan juli, jika dibandingkan dengan jadwal yang telah disusun hal ini telah dilaksanakan dengan sesuai dan tepat waktu, yang dimana peneliti melakukan wawancara setelah staff pembinaan puskesmas dan kesehatan telah selesai melakukan pengobatan umum.

- d. Independensi. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif dan masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Peneliti menilai bahwa prinsip ini belum dijalankan dengan baik oleh rumah sakit. Hal ini tidak selaras dengan peraturan yang telah disusun dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Bab pasal 14 dan 16 terkait dengan hubungan kerja dan kedudukan pegawai yang berstatus suami istri atau mempunyai hubungan keluarga. Peneliti menilai bahwa prinsip ini telah dilaksanakan dengan baik oleh rumah sakit, sikap independensi menjadi pegangan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mendominasi pihak lain.
- e. Kesetaraan dan Kewajaran. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku

kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan dan perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. penyusunan pelatihan dan pengembangan karyawan dilakukan setiap tahunnya, pelatihan dan pengembangan karyawan pada setiap tahunnya disusun sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Bagi pengumuman rekrutmen karyawan sebaiknya dilakukan publikasi di *website*, misalnya dengan melakukan publikasi alamat *e-mail* unit SDI sehingga individu hanya perlu untuk mengirimkan *e-mail* terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh rumah sakit islam agar lebih efisien bagi individu yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai calon karyawan di rumah sakit islam jakarta pondok kopi.

Pelaksanaan Internal Audit pada Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi.

- a. Perencanaan audit. auditor harus merencanakan setiap pelaksanaan audit dengan benar dan akurat. Perencanaan yang dilakukan dapat meliputi; penetapan tujuan audit, mendapatkan informasi tentang latar belakang, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit, mengkomunikasikan hasil penugasan audit dengan semua pihak yang berkaitan, mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi perhatian audit, menulis program audit, mengidentifikasi prosedur untuk mengkomunkasikan hasil audit, dan mendapatkan persetujuan atas rencana kerja audit. Pada langkah ini peneliti menilai bahwa SPI rumah sakit telah melakukan perencanaan audit yang

memadai, hal ini dapat dilihat dari penyusunan rencana audit yang telah disusun dengan rinci dan sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya seperti menetapkan tujuan pemeriksaan, menyusun latar belakang pemeriksaan, mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program audit, dan mendapatkan persetujuan atas rencana kerja audit.

- b. Pengujian dan pengevaluasian informasi. pengujian dan pengevaluasian informasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan informasi yang akurat dan kompeten serta memadai untuk menunjang temuan audit agar bermanfaat bagi organisasi dalam mencapai sasarannya. Auditor juga harus mendokumentasikan temuan-temuannya dengan menggunakan kertas kerja audit, mencatat informasi yang diperoleh dan membuat setiap analisis dari informasi yang diperoleh tersebut. Berdasarkan dengan langkah pengujian dan pengevaluasian informasi SPI rumah sakit islam telah disusun sesuai dengan kriteria pelaksanaan pengujian dan pengevaluasian informasi oleh Tugiman (2003) yang dimana dilakukan dimulai dari melakukan pengumpulan dokumen-dokumen terkait hingga proses penyusunan laporan audit.
- c. Penyampaian hasil audit. Setelah melakukan tugas audit, auditor harus menyerahkan laporan tertulis yang ditandatangani. Standar praktik professional audit internal mendorong auditor internal untuk membahas kesimpulan audit dan juga rekomendasinya dengan tingkat manajemen yang sesuai sebelum menerbitkan laporan akhir hasil audit (Tugiman, 2003). Langkah penyampaian rumah sakit islam telah dilaksanakan optimal oleh SPI rumah sakit dan telah sesuai dengan kriteria

penyampaian hasil audit oleh tugiman (2003). SPI melakukan penyusunan laporan hasil audit yang nantinya ditandatangani oleh direktur utama dan dilaporkan kepada bagian direksi dan auditee dan melakukan penyampaian laporan hasil audit kepada pihak yang bersangkutan untuk menjelaskan temuan-temuan audit yang ditemukan dan hasil rekomendasi yang diberikan pada waktu yang telah ditentukan.

- d. Tindak lanjut hasil audit. Setelah melakukan penyampaian hasil audit, Auditor internal harus melakukan tindak lanjut masalah yang dikemukakan ataupun yang direkomendasikan dalam laporan hasil audit. Auditor internal juga harus menentukan apakah setiap tindakan perbaikan yang diperlukan, yang dinyatakan dalam laporan audit telah dilakukan atau manajemen menyadari adanya risiko yang terkait dengan tidak melakukan perbaikan atas hal tersebut (Tugiman, 2003). Peneliti menilai bahwa sebaiknya tindak lanjut hasil audit juga perlu merangkul bagian SPI, ini perlu dilakukan agar SPI dapat memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan telah dijalankan dengan baik oleh auditee dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga auditor dapat memastikan bahwa laporan monitoring yang dilakukan auditee betul-betul telah dilaksanakan.

Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan bagaimana peran internal audit rumah sakit islam Jakarta pondok kopi dalam melaksanakan GCG pada rumah sakit islam jakarta pondok kopi dengan menggunakan prinsip-prinsip pada KNKG (2006) yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kesetaraan dan Kewajaran.

- a. Transparansi. Internal auditor harus dapat menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya (KNKG, 2006). Berdasarkan dengan kriteria Transparansi KNKG (2006) dan standar persyaratan pelaksanaan, pelaporan audit dan pengelolaan unit spi, prinsip ini telah dilaksanakan dengan efektif oleh SPI rumah sakit islam, yang dimana pelaksanaan prinsip ini dapat dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya, yang dimana SPI melaksanakan prinsip ini pada tahap penyampaian laporan audit, yang dimana SPI melakukan audiensi kepada Direksi dan auditee atas laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan kepada auditee, audiensi yang dilakukan sesuai dengan schedule yang telah disusun.

- b. Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini menyangkut dengan kejelasan fungsi, tugas, tanggung jawab, dan sistem bagi setiap organ perusahaan agar pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien (KNKG, 2006). Internal audit harus memiliki kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya agar dapat mengelola perusahaan secara efektif dan efisien sesuai dengan visi, dan misi perusahaan. Berdasarkan dengan kriteria Akuntabilitas oleh KNKG (2006) yang menjelaskan bahwa internal harus memiliki kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Job description SPI telah diatur dalam Buku Pedoman Organisasi Satuan Pengendalian Internal rumah sakit islam jakarta pondok kopi dalam dokumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Akuntabilitas SPI juga dapat dilihat dari sejauh mana SPI melaksanakan pelaksanaan audit, yang dimana telah dijelaskan pada pembahasannya sebelumnya bahwa SPI melaksanakan internal audit dengan melakukan empat langkah yaitu perencanaan audit, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil audit, dan tindak

lanjut hasil audit. Dari penjelasan diatas peneliti menilai bahwa SPI telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan telah disusunnya rincian kerja audit SPI, dan bagaimana SPI menjalankan fungsinya dengan melakukan pengawasan internal. Namun dalam langkah pengawasan internal masih ditemukan kelemahan, yang dimana monitoring tindak lanjut hasil audit hanya dilakukan sebatas dengan membuat laporan hasil monitoring oleh auditee dengan tidak melakukan monitoring langsung atas pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan.

- c. Responsibilitas. Responsibilitas atau tanggung jawab merupakan kepatuhan dalam mengelola perusahaan terhadap prinsip korporasi, tidak hanya itu prinsip rensponsibilitas juga dilihat sejauh mana perusahaan telah melakukan tanggungjawabnya (KNKG, 2006). Pada prinsip ini peneliti menilai bahwa SPI telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ruang lingkup kerjanya, dan memastikan bahwa penyajian laporan perusahaan telah memenuhi peraturan dengan melakukan pelaksanaan audit dalam langkah pengujian dan pengevaluasian informasi dengan menggunakan 3 langkah utama yaitu deskripsi, dokumentasi, dan demonstrasi. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak SPI dan direktur keuangan yang menjelaskan bahwa SPI memiliki tanggung jawab kepada direktur utama untuk melaporkan segala kegiatan yang dilakukan,, dan melaporkan laporan hasil audit kepada direksi unit yang diaudit, pemberi tugas (direktur utama).
- d. Independensi. Independensi merupakan sikap kemandirian dalam melakukan setiap tugas dengan tidak berpengaruh dengan pihak lain dan juga tidak adanya benturan

kepentingan dan setiap tugas yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah dibuat perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Internal auditor harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif (KNKG, 2006). Berdasarkan dengan pengumpulan dokumen, susunan organisasi SPI tidak memiliki rangkap jabatan di unit organisasi rumah sakit islam lainnya. Selanjutnya berdasarkan dengan wawancara yang telah dilakukan dengan kepala unit SPI, dalam melaksanakan tugasnya setiap staff SPI harus menjaga independensi, dan profesionalitas agar dalam menjalankan tugasnya tidak ada intervensi dari pihak lain. Berdasarkan dengan hasil observasi, independensi internal auditor juga dilakukan dengan menyusun batasan kerja auditor sehingga auditor mengetahui bagian mana saja yang menjadi tanggung jawab auditnya, sehingga SPI memiliki batasan dan tidak melakukan intervensi tugas yang tidak menjadi ruang lingkup kerjanya.

- e. Kesetaraan dan Kewajaran. Dalam kriteria KNKG (2006) menjelaskan bahwa aalam melaksanakan kegiatannya, internal auditor harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan pihak SPI yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya SPI memberikan kesempatan kepada auditee dan pemberi tugas pemeriksaan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan hasil temuan selama pemeriksaan berlangsung. Hal ini biasanya dilakukan pada saat pertemuan internal dengan pihak

auditee dan pemberi tugas sebelum laporan hasil diberikan kepada auditee, sehingga rekomendasi yang diberikan sudah menjadi rekomendasi yang obyektif melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak marketing yang menjadi auditee pun menjelaskan bahwa, diadakan pertemuan internal dengan pihak SPI, Direktur Utama, dan kepala Unit Direksi yang bersangkutan apabila ditemukan miskomunikasi terkait beberapa hal tertentu menyangkut dengan aktivitas audit yang dilakukan SPI. Berdasarkan dengan penjelasan diatas, peneliti menilai bahwa SPI rumah sakit telah menjalankan prinsip ini dengan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan *good corporate governance* pada rumah sakit telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip yang telah disusun oleh KNKG (2006). Namun masih ada beberapa prinsip yang belum dijalankan dengan maksimal oleh rumah sakit islam jakarta pondok kopi, seperti pada prinsip transparansi yang dimana rumah sakit masih belum melakukan transparansi laporan keuangan, hal ini juga dikarenakan rumah sakit yang masih belum *go public*. Selanjutnya, pada prinsip independensi masih ditemukan kelemahan dimana yaitu masih ditemukan hubungan kerja berupa hubungan keluarga antar karyawan yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan gcg pada rumah sakit belum sepenuhnya dilaksanakan oleh rumah sakit islam jakarta pondok

kopi dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah disusun oleh rumah sakit islam. Dan yang terakhir pada prinsip kesetaraan dan kewajaran yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masih ditemukan beberapa kelemahan pelaksanaan gcg dalam rumah sakit islam jakarta pondok kopi dimana rumah sakit belum melakukan publikasi terkait dengan rekrutmen karyawan agar dapat lebih efektif untuk diakses bagi calon karyawan baru.

- b. SPI rumah sakit islam sudah memiliki langkah pelaksanaan audit yang memadai, pelaksanaan audit terdiri dari perencanaan audit yang dilakukan dengan menyusun program tahunan, meminta surat tugas, dan menyusun kerangka acuan kerja pemeriksaan. Selanjutnya dalam pengujian dan pengevaluasian informasi, ini dilakukan dengan melakukan tiga poin utama yaitu deskripsi, demonstrasi, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu penyampaian hasil audit, penyampaian hasil audit dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti auditee dan pemberi tugas. Penyampaian hasil audit dilakukan dengan audiensi internal. Lalu langkah terakhir yang dilakukan dengan melakukan tindak lanjut hasil audit, tindak lanjut hasil audit dilakukan dengan dibuatnya laporan tindak lanjut yang dibuat oleh auditee kepada SPI dan direksi, namun pada langkah ini SPI tidak melakukan monitoring atau pengawasan atas tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi audit yang mendalam kepada auditee apakah dari laporan yang telah disusun auditee telah dilaksanakan atau belum.

Saran

Bagi manajemen:

1. Pelaksanaan independensi yang lemah yang dapat dilihat dari hubungan kerja yang masih terdapat hubungan keluarga didalamnya hal ini perlu

ditindak lanjut karena tidak sesuai dengan tata tertib yang telah disusun pada PKB.

2. Memberikan informasi yang jelas terkait dengan rekrutmen tenaga kerja baru dengan melakukan *publish* di website agar lebih efisien.
3. Membuat *whistleblowing system* agar semua pihak berkepentingan dapat melaporkan karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan peraturan.
4. Perlu dilakukannya monitoring atau pengawasan tindak lanjut yang lebih mendalam terhadap hasil rekomendasi audit yang diberikan, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan apakah hasil rekomendasi yang diberikan telah dijalankan atas perbaikan dari temuan-temuan yang telah dilakukan oleh auditor.

Bagi penelitian selanjutnya:

1. Melakukan penelitian dengan mengikuti proses audit dengan pihak internal audit sehingga peneliti dapat mengetahui kendala dan masalah selama proses audit berlangsung.
2. Melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan lingkup yang lebih luas seperti wawancara dengan Direktur Utama.
3. Melakukan pembahasan *Good Corporate Governance* pada ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terfokus pada masalah sumber daya manusia perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Badjuri. 2011. *Faktor - Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit, Auditor Independen Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Volume 3 Nomor 2 ISSN : 1979 - 4878.
- Agus, Salim. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Akmal. 2006. *Pemeriksaan Intern (Internal Audit)*. Jakarta: PT. Indeks.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Economic Co-operation and Development (OECD). 2015. Indonesia Policy Brief.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Seri Tata Kelola Perusahaan Jilid II.
- Gempur, Santoso. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Kaihatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 8 Nomor 1 ISSN: 1411-1438, e-ISSN: 2338-8234.
- Kamal, Miko. 2011. *Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance*. Jurnal Manajemen Teknologi Volume 10 Number 2 2011
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. *Standar Profesional Audit Internal. Jilid 1*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Messier, William F. Dkk. 2014. *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Sistematis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morariu, Ana *et al.* 2009. *Internal Audit and Corporate Governance, an Added Value for Entitie's Management*. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(1)

- Mulyadi. 2002. *Auditing, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, Dedy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Panduan Pelaksanaan Satuan Pengendalian Internal. 2017. RS Islam Jakarta Pondok Kopi
- Pedoman Satuan Pemeriksaan Internal. 2017. RS Islam Jakarta Pondok Kopi
- Perjanjian Kerja Bersama. 2017. BPH Rumah Sakit Islam Jakarta
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56 /POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Sukrisno, Agoes. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sawyer, Lawrence B, Dittenhofer Mortimer A, Scheiner James H. 2005. *Audit Internal Sawyer The Institute of Internal Auditors*, Diterjemahkan oleh Desi Adharaini. Jakarta: Salemba Empat.
- Sawyer, Lawrence B, Dittenhofer Mortimer A, Scheiner James H. 2006. *Internal Auditing*, Diterjemahkan oleh Ali Akbar. Jakarta: Salemba Empat
- Syakhroza, Ahmad. 2003. *Best Practices dalam Konteks Lokal Perbankan Indonesia*. Majalah Usahawan. No. 06 Th.XXII, 8 halaman.
- Siregar, S. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjager, I Nyoman et al. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Tugiman, Hiro. 2006. *Standar Profesional Audit Internal*. Kanisius: Yogyakarta
- Tugiman, Hiro. 2003. *Standar Profesional Audit Internal*. Kanisius: Yogyakarta
- Uraian Pekerjaan Kepala Satuan Pengendalian Internal FORM.PK-76000.035/Rev.05. 2017. Bagian Satuan Pengendalian Internal.

Uraian Pekerjaan Staf Khusus Auditor Keuangan Internal FORM.PK-76000.035/Rev.05. 2017. Bagian Satuan Pengendalian Internal.

Uraian Pekerjaan Staf Khusus Auditor Manajemen FORM.PK-76000.035/Rev.05. 2017. Bagian Satuan Pengendalian Internal.

Uraian Pekerjaan Staf Khusus Auditor Mutu Pelayanan FORM.PK-76000.035/Rev.05. 2017. Bagian Satuan Pengendalian Internal.

Utama, Marta. 2004. *Komite Audit, Good Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol 1.

WHO Technical Report Series No. 122/1957

www.cnnindonesia.com/teknologi/20150715151210-185-66575/ada-skandal-akuntansi-ceo-toshiba-mundur/, diakses 20 Maret 2017.

www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170314135204-78-199997/kpk-soroti-rangkap-jabatan-pejabat-eselon-i-di-bumn/, diakses 20 Maret 2017.

www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c7fdb93a6c2/bi-sebut-empat-bank-tak-terapkan-gcg, diakses 20 Maret 2017.